

**EVALUASI PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH DENGAN ANALISIS STANDAR
BELANJA (ASB) TAHUN 2015-2017 (STUDI KASUS
INSPEKTORAT KOTA BITUNG)**

Tressje Winerungan, Vekie A. Rumate, Een N. Walewangko

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi*

ABSTRAK

ASB mendorong penetapan biaya dan pengalokasian anggaran kepada setiap aktivitas unit kerja menjadi lebih logis dan mendorong dicapainya efisiensi secara terus-menerus karena adanya perbandingan (benchmarking) biaya per unit setiap output dan diperoleh praktek-praktek terbaik (best practices) dalam desain aktivitas. Dengan kata lain, Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah Analisis Standar Belanja Inspektorat Kota Bitung Tahun 2015-2017 Dan untuk mengetahui berapakah nilai minimum, maksimum dan prosentase alokasi belanja setiap kegiatan Inspektorat Kota Bitung Tahun 2015-2017?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan tentang Evaluasi Penganggaran Keuangan Daerah dengan Analisis Standar Belanja (ASB) di Inspektorat Kota Bitung. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Standar Belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis Standar Belanja Inspektorat Kota Bitung Tahun 2015-2017 terdiri dari persentase/alokasi masing – masing belanja terhadap total belanja, diperoleh nilai minimum dan nilai maksimum untuk standar belanja. Persentase/alokasi masing – masing belanja terhadap total belanja memiliki nilai maksimum yaitu pada kegiatan/ belanja Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan memiliki nilai minimum yaitu pada kegiatan pembulatan gaji.

Kata kunci : *Anggaran Berbasis Kinerja, Analisis Standar Belanja*

ABSTRACT

ASB encourages costing and budget allocation for each work unit becomes more important and continuous to benchmark cost per unit per output and best practices in the design of activities. In other words, Standard Spending Analysis (ASB) is one of the components that should be developed as a basis for performance-based budget performance. The purpose of the study is to know how the Analysis of Spectrum Expenditure Standard of Bitung City 2015-2017 And to find out what is the minimum, maximum and percentage of spending funds per activity Inspektorat Kota Bitung Year 2015-2017?

This type of research is descriptive research. In this research that is describe about Evaluation of Local Budgeting (ASB) at Inspectorate of Bitung City. Data analysis used is Analysis of Shopping Standard. The results show that the Analysis of Bitung City Standard Expenditure 2015-2017 Year consists of the amount of each spending total, minimum minimum and maximum value for standard spending. Percentage / each - each spending on total spending has a maximum value that is on activities / shopping. Minimum cost and minimum cost at time of rounding of salary.

Keywords: *Performance-based budgeting, standard cost analysis*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyusunan anggaran merupakan salah satu bagian yang penting dalam system akuntansi khususnya pada sektor pemerintahan. System anggaran yang dulunya menggunakan system tradisional saat ini sudah mulai beralih pada system anggaran berbasis kinerja. Dalam prakteknya, penggunaan system anggaran tradisional tidaklah efektif dikarenakan penyusunan anggaran hanya berdasarkan jumlah anggaran tahun sebelumnya. Untuk itulah dibuat system penganggaran baru yaitu anggaran berbasis kinerja yang berfokus pada manajemen sektor public yang berorientasi pada kinerja, bukan kebijakan (Zuraidha, 2014).

Untuk menyusun anggaran daerah dengan pendekatan kinerja diperlukan tolak ukur kinerja setiap unit kinerja yang kemudian diterjemahkan melalui berbagai program dan kegiatan yang dapat ditentukan satuan ukur dan target kinerja serta analisis standar belanja (ASB). Beban kerja dan biaya merupakan dua komponen yang tidak terpisahkan dalam penilaian kewajaran pembebanan belanja. Berikut ini adalah data mengenai Belanja Inspektorat Kota Bitung Tahun 2015-2017 :

Tabel 1 Total Belanja Inspektorat Kota Bitung Tahun 2015-2017

Tahun	Total Belanja	Keterangan
2015	5,011,211,820.00	-
2016	5,512,399,285.00	Meningkat
2017	5,403,941,264.00	Menurun

Sumber : Inspektorat Kota Bitung Tahun 2018

Tabel 1 menunjukkan Total Belanja Inspektorat Kota Bitung Tahun 2015-2017. Pada tahun 2016 total belanja mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh adanya peningkatan yang signifikan belanja langsung. Dan pada tahun 2017 Total belanja mengalami penurunan akibat adanya penurunan belanja langsung. Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa adanya fluktuasi total belanja selama tahun 2015-2017.

Hal ini berarti setiap daerah harus dapat menggali dana milik masyarakat semaksimal mungkin dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah karena sumber utama APBD adalah pendapatan asli daerah itu sendiri, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan pengeluaran dilakukan oleh daerah dalam bentuk belanja daerah (Vegirawati, 2012). Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung yang merupakan belanja tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dan belanja langsung merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah yang dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Analisis Standar Belanja Inspektorat Kota Bitung Tahun 2015-2017? Dengan menggunakan analisis standar belanja (ASB) berapakah nilai minimum, maksimum dan prosentase alokasi belanja setiap kegiatan Inspektorat Kota Bitung Tahun 2015-2017?
2. Apakah *Cost Driver* berpengaruh terhadap total Belanja?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Analisis Standar Belanja Inspektorat Kota Bitung Tahun 2015-2017. Untuk mengetahui berapakah nilai minimum, maksimum dan prosentase alokasi belanja setiap kegiatan Inspektorat Kota Bitung Tahun 2015-2017?
2. Untuk mengetahui apakah *Cost Driver* berpengaruh terhadap total Belanja.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu keuangan daerah, lebih khusus yang berkaitan dengan evaluasi penganggaran keuangan Inspektorat Kota Bitung.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama kuliah melalui penelitian yang dilakukan.
- b) Pembaca, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan bahan acuan untuk peneliti-peneliti lain dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c) Bagi Pemerintah Daerah, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan untuk mengetahui evaluasi penganggaran keuangan daerah khususnya Inspektorat Kota Bitung sehingga pemerintah daerah akan dapat menyusun strategi dalam rangka memenuhi kinerja keuangan organisasi yang efektif dan efisien.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Teori

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Anggaran memiliki peranan yang sangat strategis di dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, maka APBD terdiri atas 3 bagian, yaitu : "pendapatan, belanja, dan pembiayaan." Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja digolongkan menjadi 4 yakni belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Belanja aparatur daerah diklasifikasi menjadi 3 kategori yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan yaitu : sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah adalah : sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dan transfer dari dana cadangan. Sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas : pembayaran utang

pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun sekarang. (Halim, 2004 : 18).

Penganggaran Keuangan Daerah

Keuangan Daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu. Selanjutnya Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002:9). Anggaran dapat dianggap sebagai alat pengendali untuk membandingkan sampai sejauh mana hasil yang dicapai dengan rencana yang telah dicapai. Disamping itu anggaran merupakan hal yang dicapai. Disamping itu anggaran merupakan hal penting bagi Pemerintahan karena menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.

Analisis Standar Belanja (ASB)

Analisa Standar Belanja (ASB) adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan kewajaran biaya di unit kerja dalam satu tahun anggaran Analisis Standar Belanja (ASB) sudah diperkenalkan pertama kali kepada Pemerintah Daerah melalui Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Kajian Empiris

Haslinda (2016). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perencanaan anggaran dan evaluasi anggaran terhadap kinerja organisasi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Wajo dengan menambahkan standar biaya sebagai variabel moderating. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode Kuantitatif dengan pendekatan Kausal Komparatif. Populasidalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Wajo yang berjumlah 54 Orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan evaluasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam studi ini adalah Penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau (Umar, 2010).

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang merupakan data yang berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui (Kasiram, 2008:149). Laporan Anggaran Inspektorat Kota Bitung. Seta data kualitatif merupakan data berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang di amati yang tidak dapat diukur dalam skala numeric yaitu Sejarah Inspektorat Kota Bitung

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari literature serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2. Dokumenter yaitu memperoleh data sekunder yang diperlukan dengan menggali informasi pada Inspektorat Kota Bitung.

Metode Analisis

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau deskripsi atas suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2009). Dan Metode analisis yang digunakan adalah metode OLS /regresi sederhana untuk memperoleh model ASB yang diinginkan; Mencari variabel-variabel yang mempengaruhi (Independent Variables) besar/kecilnya anggaran untuk setiap jenis kegiatan dan Menghitung seberapa besar pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kebutuhan anggaran. Dalam OLS ini, variabel tidak bebas merupakan total biaya dari suatu kegiatan, sedangkan variabel bebas merupakan *cost driver* dari kegiatan tersebut. Penggunaan regresi sederhana dalam menyusun ASB berguna untuk membuat model (persamaan) regresi untuk peramalan belanja dari suatu kegiatan. Rumusnya sebagai berikut :

$$Y = B_0 + B_1 X_1$$

Dimana :

- Y = Variabel terikat (Biaya kegiatan)
- B₀ = Konstanta
- B₁ = Koefisien Regresi
- X₁ = *Cost Driver*

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Berikut ini adalah definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Penganggaran Keuangan Daerah adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peran penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan yang berkaitan dengan keuangan daerah.
2. Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. ASB adalah instrumen untuk mengukur kewajaran antara beban kerja dan belanja dan sebuah aktifitas atau kegiatan. ASB memberikan kepastian terjaganya hubungan antara input (dana) dan output (target kinerja)
3. Persentase Alokasi Belanja diukur dengan cara menghitung alokasi belanja rata-rata kepada masing-masing objek belanja dapat dilakukan dengan cara membagi total belanja masing-masing objek dengan total anggaran kegiatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi adalah penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB. Deskripsi digunakan agar memudahkan dalam mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan juga memberikan kemudahan ketika menggunakan ASB dalam penyusunan anggaran. Berikut ini adalah jenis-jenis kegiatan (Belanja Inspektorat Kota Bitung) :

Tabel 1 Kegiatan/Jenis Belanja

No	Kegiatan/Jenis Belanja	No	Kegiatan/Jenis Belanja
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	26	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2	Tunjangan Keluarga	27	Belanja Cetak
3	Tunjangan Jabatan	28	Belanja Penggandaan
4	Tunjangan Fungsional	29	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
5	Tunjangan Fungsional Umum	30	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
6	Tunjangan Beras	31	Belanja Pakaian Batik Tradisional
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	32	Belanja Pakaian Olahraga
8	Pembulatan Gaji	33	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
9	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	34	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
10	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
11	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	36	Belanja Bimbingan Teknis
12	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
13	Belanja Alat Tulis Kantor	38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
14	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya		
15	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
16	Belanja bahan visualisasi (pameran, spanduk, reklame)	40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
17	Belanja Telepon	41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
18	Belanja Air		
19	Belanja Listrik	42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
20	Belanja Surat Kabar/Majalah	43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
21	Belanja jasa perawatan computer	44	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat
22	Belanja jasa perawatan meubelair/elektronik (non komputer)	45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual
23	Belanja Jasa Service	46	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan
24	Belanja Penggantian Suku Cadang	47	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
25	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas		

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, 2015-2017

Tabel 1 menunjukkan Kegiatan/Jenis Belanja Inspektorat kota Bitung selama tahun 2015-2017. Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat bahwa terdapat 47 jenis kegiatan/belanja.

Pengendali Belanja

Pengendali Belanja adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. Faktor-faktor ini tentunya merupakan beban kerja riil dari kegiatan yang dimaksud. Pengendali belanja dalam hal ini adalah Jumlah Peserta, jumlah hari pelatihan dan unit (barang). Berikut ini adalah pengendali biaya (cost driver) dari setiap jenis kegiatan/jenis belanja :

Tabel 2 Pengendali Biaya (Cost Driver)

No	Kegiatan/Jenis Belanja	Cost Driver	No	Kegiatan/Jenis Belanja	Cost Driver
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	32	26	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4
2	Tunjangan Keluarga	32	27	Belanja Cetak	30
3	Tunjangan Jabatan	32	28	Belanja Penggandaan	30
4	Tunjangan Fungsional	32	29	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	30
5	Tunjangan Fungsional Umum	32	30	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	32
6	Tunjangan Beras	32	31	Belanja Pakaian Batik Tradisional	32
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	32	32	Belanja Pakaian Olahraga	32
8	Pembulatan Gaji	32	33	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32
9	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	32	34	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32
10	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32	35	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	32
11	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6	36	Belanja Bimbingan Teknis	40
12	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	8	37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	8
13	Belanja Alat Tulis Kantor	40			
14	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	64	38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8
15	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12	39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	8
16	Belanja bahan visualisasi (pameran, spanduk, reklame)	8	40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	10

17	Belanja Telepon	30	41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12
18	Belanja Air	30			
19	Belanja Listrik	30	42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	12
20	Belanja Surat Kabar/Majalah	30	43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10
21	Belanja jasa perawatan komputer	8	33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	
22	Belanja jasa perawatan meubelair/elektronik (non komputer)	14	45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	8
23	Belanja Jasa Service	4	46	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	12
24	Belanja Penggantian Suku Cadang	8	47	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1
25	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	30			

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, 2015-2017

Analisis Hasil Penelitian (Perhitungan Analisis Standar Belanja)

Berikut ini adalah hasil perhitungan analisis standar belanja dan alokasi belanja per kegiatan Inspektorat Kota Bitung Tahun 2015-2017 :

Tabel 3 Analisis Standar Belanja

No	Kegiatan/Belanja	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,370,303,660.00	27.3	1,554,651,480.00	28.2	1,476,638,880.00	27.3
2	Tunjangan Keluarga	124,236,218.00	2.48	133,532,750.00	2.42	136,297,764.00	2.52
3	Tunjangan Jabatan	121,185,000.00	2.42	119,205,000.00	2.16	125,505,000.00	2.32
4	Tunjangan Fungsional	89,145,000.00	1.78	87,450,000.00	1.59	79,790,000.00	1.48
5	Tunjangan Fungsional Umum	28,580,000.00	0.57	27,540,000.00	0.5	25,955,000.00	0.48
6	Tunjangan Beras	74,090,060.00	1.48	74,954,700.00	1.36	76,113,420.00	1.41
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	33,327,207.00	0.67	13,065,731.00	0.24	2,741,377.00	0.05
8	Pembulatan Gaji	23,176.00	0	18,700.00	0	15,451.00	0
9	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,656,742,208.00	33.1	1,635,542,532.00	29.7	1,722,532,511.00	31.9

10	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67,202,000.00	1.34	28,002,000.00	0.51	76,405,000.00	1.41
11	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	18,300,000.00	0.37	33,100,000.00	0.6	49,390,000.00	0.91
12	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	102,692,749.00	2.05	6,450,000.00	0.12	114,291,098.00	2.12
13	Belanja Alat Tulis Kantor	183,955,000.00	3.67	121,681,400.00	2.21	3,306,000.00	0.06
14	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3,000,000.00	0.06	4,782,000.00	0.09	9,931,406.00	0.18
15	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2,504,000.00	0.05	3,654,950.00	0.07	0.00	0
16	Belanja bahan visualisasi (pameran, spanduk, reklame)	2,250,000.00	0.04	1,796,000.00	0.03	444,000.00	0.01
17	Belanja Telepon	9,853,800.00	0.2	12,567,194.00	0.23	8,757,127.00	0.16
18	Belanja Air	6,570,000.00	0.13	3,700,000.00	0.07	3,067,000.00	0.06
19	Belanja Listrik	48,000,000.00	0.96	28,100,000.00	0.51	16,463,000.00	0.3
20	Belanja Surat Kabar/Majalah	18,400,000.00	0.37	20,485,000.00	0.37	17,390,000.00	0.32
21	Belanja jasa perawatan komputer	2,000,000.00	0.04	1,500,000.00	0.03	2,000,000.00	0.04
22	Belanja jasa perawatan meubelair/elektronik (non komputer)	8,000,000.00	0.16	5,853,500.00	0.11	8,000,000.00	0.15
23	Belanja Jasa Service	12,000,000.00	0.24	15,980,363.00	0.29	15,994,500.00	0.3
24	Belanja Penggantian Suku Cadang	26,400,000.00	0.53	12,483,000.00	0.23	14,792,254.00	0.27
25	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	82,294,222.00	1.64	67,551,130.00	1.23	68,585,000.00	1.27
26	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5,280,000.00	0.11	4,235,000.00	0.08	2,679,000.00	0.05
27	Belanja Cetak	5,600,000.00	0.11	4,300,000.00	0.08	3,602,500.00	0.07
28	Belanja Penggandaan	9,125,000.00	0.18	7,577,000.00	0.14	13,599,900.00	0.25
29	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,625,000.00	0.05	2,625,000.00	0.05	10,695,000.00	0.2
30	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	36,500,000.00	0.73	53,550,000.00	0.97	66,375,000.00	1.23

31	Belanja Pakaian Batik Tradisional	17,424,000.00	0.35	18,150,000.00	0.33	20,900,000.00	0.39
32	Belanja Pakaian Olahraga	22,275,000.00	0.44	24,750,000.00	0.45	28,500,000.00	0.53
33	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,809,000.00	0.24	4,740,000.00	0.09	498,050,000.00	9.22
34	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	410,694,520.00	8.2	365,943,500.00	6.64	374,901,530.00	6.94
35	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40,500,000.00	0.81	50,000,000.00	0.91	30,160,000.00	0.56
36	Belanja Bimbingan Teknis	7,500,000.00	0.15	8,975,000.00	0.16	0.00	0
37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	14,700,000.00	0.29	0.00	0	14,700,000.00	0.29
38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0.00	0	0.00	0	0.00	0
39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	23,300,000.00	0.46	0.00	0	23,300,000.00	0.46
40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	12,150,000.00	0.24	0.00	0	9,050,000.00	0.17
41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	39,100,000.00	0.78	0.00	0	169,454,546.00	3.14
42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	121,125,000.00	2.42	72,986,355.00	1.33	0.00	0
43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	12,350,000.00	0.25	81,500,000.00	1.48	69,000,000.00	1.28
44	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	7,500,000.00	0.15	2,800,000.00	0.05	31,000,000.00	0.57
45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	8,250,000.00	0.16	16,600,000.00	0.3	20,000,000.00	0.37

46	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	5,000,000.00	0.1	2,450,000.00	0.04	5,000,000.00	0.1
47	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	99,600,000.00	1.99	772,320,000.00	14	99,600,000.00	1.99
Total		5,003,461,820.00	100%	5,507,149,285.00	100%	5,544,973,264.00	100%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, 2015-2017

Tabel 3 menunjukkan Analisis Standar Belanja. Dari hasil perhitungan maka dapat dilihat bahwa standar belanja yang paling tinggi adalah pada Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja. Sementara gaji pokok PNS merupakan yang tertinggi kedua. Sedangkan kegiatan/belanja yang memiliki nilai terendah adalah pembulatan gaji. Berikut ini adalah perincian pertahunnya :

Tabel 4 Belanja Minimum dan Maksimum

Kegiatan/Belanja	Tahun	Jumlah
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja(Belanja Maksimum)	2015	1,656,742,208.00
	2016	1,635,542,532.00
	2017	1,722,532,511.00
Pembulatan Gaji (Belanja Minimum)	2015	23,176.00
	2016	18,700.00
	2017	15,451.00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, 2015-2017

Tabel 4 menunjukkan Belanja Minimum dan Maksimum Inspektorat Kota Bitung Tahun 2015-2017. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja merupakan belanja maksimum. Pada tahun 2015 nilai tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar Rp. 1,656,742,208.00 dan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi Rp 1,635,542,532.00 dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi Rp 1,722,532,511.00. Sedangkan belanja terendah adalah pembulatan gaji yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp. 23,176.00, tahun 2016 sebesar Rp. 18,700.00 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 15,451.00 atau mengalami penurunan selama tahun 2015-2017.

Pengaruh Cost Driver terhadap Total Belanja

Tabel 5 Tabel Coefficient

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22260015.194	87774848.565		.254	.801
	Cost Driver	3882440.118	3359092.397	.172	1.156	.254
a. Dependent Variable: Total Belanja Tahun 2015						
1	(Constant)	66500002.599	97061272.850		.685	.497
	Cost Driver	2388438.210	3714478.452	.096	.643	.524
a. Dependent Variable: Total Belanja Tahun 2016						
1	(Constant)	32428333.576	93821574.609		.346	.731
	Cost Driver	3954409.678	3590497.085	.164	1.101	.277
a. Dependent Variable: Total Belanja Tahun 2017						

Sumber : Olah data dengan SPSS 20, 2018

Persamaan regresi $Y_{2015} = 22260015.194 + 3882440.118X_1$ menggambarkan bahwa variabel bebas (independen) adalah *Cost Driver*. Dalam model regresi tersebut dapat dinyatakan jika satu variabel independen berubah sebesar 1 (satu) dan lainnya konstan, maka perubahan variabel terikat (dependen) Pertumbuhan Ekonomi (Y) adalah sebesar nilai koefisien (b) dari nilai variabel independen tersebut. Konstanta (α) sebesar 22260015.194 memberikan pengertian bahwa jika *Cost Driver* tidak mengalami perubahan atau sama dengan nol (0) maka besarnya Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebesar 22260015.194 satuan. Jika nilai b_1 yang merupakan koefisien regresi dari *Cost driver* sebesar 3882440.118 yang artinya mempunyai pengaruh positif. Dengan nilai Sig sebesar $0,254 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a di tolak atau *Cost Driver* tidak berpengaruh terhadap Total Belanja.

Persamaan regresi $Y_{2016} = 66500002.599 + 2388438.210X_1$ menggambarkan bahwa variabel bebas (independen) adalah *Cost Driver*. Dalam model regresi tersebut dapat dinyatakan jika satu variabel independen berubah sebesar 1 (satu) dan lainnya konstan, maka perubahan variabel terikat (dependen) Pertumbuhan Ekonomi (Y) adalah sebesar nilai koefisien (b) dari nilai variabel independen tersebut. Konstanta (α) sebesar 66500002.599 memberikan pengertian bahwa jika *Cost Driver* tidak mengalami perubahan atau sama dengan nol (0) maka besarnya Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebesar 66500002.599 satuan. Jika nilai b_1 yang merupakan koefisien regresi dari *Cost driver* sebesar 2388438.210 yang artinya mempunyai pengaruh positif. Dengan nilai Sig sebesar $0,524 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a di tolak atau *Cost Driver* tidak berpengaruh terhadap Total Belanja.

Persamaan regresi $Y_{2017} = 32428333.576 + 3954409.678X_1$ menggambarkan bahwa variabel bebas (independen) adalah *Cost Driver*. Dalam model regresi tersebut dapat dinyatakan jika satu variabel independen berubah sebesar 1 (satu) dan lainnya konstan, maka perubahan variabel terikat (dependen) Pertumbuhan Ekonomi (Y) adalah sebesar nilai koefisien

(b) dari nilai variabel independen tersebut. Konstanta (α) sebesar 32428333.576 memberikan pengertian bahwa jika *Cost Driver* tidak mengalami perubahan atau sama dengan nol (0) maka besarnya Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebesar 32428333.576 satuan. Jika nilai b_1 yang merupakan koefisien regresi dari *Cost driver* sebesar 3954409.678 yang artinya mempunyai pengaruh positif. Dengan nilai Sig sebesar $0,277 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a di tolak atau *Cost Driver* tidak berpengaruh terhadap Total Belanja.

Pembahasan

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Haslinda (2016) yang menemukan bahwa perencanaan anggaran dan evaluasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Selain itu, dalam pengujian regresi moderasi dengan pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa standar biaya berpengaruh negatif dan signifikan dalam memoderasi perencanaan anggaran terhadap kinerja organisasi dan standar biaya tidak berpengaruh dalam memoderasi evaluasi anggaran terhadap kinerja organisasi. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Murtin (2013) yang menunjukkan bahwa Kontribusi penelitian ini bagi pemerintah daerah dapat di gunakan sebagai alat prediksi kewajaran belanja setiap SKPD serta sebagai alat pengendalian bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada saat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun yang akan datang.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Standar Belanja Inspektorat Kota Bitung Tahun 2015-2017 terdiri dari persentase/alokasi masing – masing belanja terhadap total belanja, diperoleh nilai minimum dan nilai maksimum untuk standar belanja.
2. Persentase/alokasi masing – masing belanja terhadap total belanja memiliki nilai maksimum yaitu pada kegiatan/ belanja Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan memiliki nilai minimum yaitu pada kegiatan pembulatan gaji.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Dengan diketahui belanja minimum dan belanja maksimum maka dapat dijadikan sebagai acuan untuk dimasa yang akan datang proses penyusunan anggaran belanja Inspektorat Kota Bitung.
2. Karena penerapan Analisis Standar Belanja Belum diterapkan di Inspektorat Kota Bitung dan di perangkat daerah Kota Bitung maka saran yang dapat diberikan adalah kiranya pemerintah Kota Bitung menggunakan ASB sebagai dasar.
3. Faktor-faktor lain yang belum diungkap dalam penelitian ini, semoga pada penelitian selanjutnya dapat membahas faktor-faktor lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim. 2004.** *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002.** *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Vegirawati, Titin. 2012. Pengaruh Alokasi Belanja Langsung Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi Vol. 2 No. 1, Januari 2012* hal. Diakses Tanggal 17 November 2017.

Zuraidha. 2014. Evaluasi Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Pengelolaan Keuangan BLUD (Studi Kasus pada RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan). *theses.uin-malang.ac.id/2279/12/11520015*. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, Vol. IX. No. Diakses Tanggal 17 November 2017.

